



Policy Capacity dalam Implementasi Kebijakan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Kurang Mampu

Melinda Trisnawati*¹, Elfa Indah Shofiyah², Falih Suaedi³

^{1,2,3}Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: mlndtrisnawati@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-02	This study aims to analyze policy capacity in the implementation of scholarship programs in Seruyan Regency. The background of this research is based on the low participation rate in higher education and various challenges in scholarship policy implementation. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection through document analysis of regulations, government reports, and relevant academic literature. The analysis is conducted using the policy capacity framework, which includes administrative capacity, contingent political management, and expectations satisfaction. The findings reveal that the scholarship policy has been supported by adequate regulations and budget allocation; however, its implementation still faces several challenges, such as limited access to information, lack of program socialization, and geographical constraints. In addition, transparency as well as monitoring and evaluation mechanisms have not been fully optimized. Therefore, policy capacity in scholarship implementation needs to be strengthened, particularly in resource management, policy communication, and public expectation fulfillment to ensure more effective and targeted policy outcomes.
Keywords: <i>Policy Capacity;</i> <i>Scholarship Policy;</i> <i>Policy Implementation;</i> <i>Higher Education;</i> <i>Local Government.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-02	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kebijakan (<i>policy capacity</i>) dalam implementasi program beasiswa pendidikan di Kabupaten Seruyan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, laporan pemerintah, dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan menggunakan kerangka <i>policy capacity</i> yang meliputi <i>administrative capacity</i> , <i>contingent political management</i> , dan <i>expectations satisfaction</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa telah didukung oleh regulasi dan anggaran yang memadai, namun implementasinya belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi, hambatan geografis, serta belum optimalnya transparansi dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antar dimensi kapasitas kebijakan, khususnya pada aspek implementasi dan pemenuhan ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kebijakan, terutama dalam pengelolaan sumber daya, komunikasi kebijakan, dan peningkatan aksesibilitas program agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kata kunci: <i>Policy Capacity;</i> <i>Beasiswa Pendidikan;</i> <i>Implementasi Kebijakan;</i> <i>Pendidikan Tinggi;</i> <i>Pemerintah Daerah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan yang bermutu seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun geografis (Republik Indonesia, 1945).

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan bahwa pada tahun

2023 hanya sekitar 6,68% penduduk Indonesia yang telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki akses optimal terhadap pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Viva Budy Kusnandar, 2024).

Kondisi tersebut semakin terlihat di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi di wilayah ini masih tergolong rendah, dengan persentase lulusan perguruan tinggi yang terbatas pada jenjang S1, S2, maupun S3. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan yang cukup signifikan antara

tingkat nasional dan daerah (Viva Budy Kusnandar, 2021).

Di Kabupaten Seruyan, permasalahan pendidikan menjadi lebih kompleks. Berdasarkan data SUSENAS Maret 2024, mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas hanya memiliki tingkat pendidikan dasar (SD/MI) sebesar 36,65%, dan masih terdapat 10,38% penduduk yang tidak memiliki ijazah sama sekali. Bahkan, sekitar 71,31% penduduk masih berada pada tingkat pendidikan di bawah SMA/SMK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program wajib belajar 12 tahun telah dicanangkan, implementasinya belum sepenuhnya optimal di daerah tersebut (Kemendikdasmen, 2025).

Selain itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 hanya mencapai 8 tahun, yang setara dengan jenjang pendidikan SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi masih sangat terbatas. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh berbagai hambatan struktural yang bersifat multidimensional (Badan Pusat Statistik, 2025).

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Seruyan, antara lain adalah kesenjangan akses geografis, kualitas pendidikan yang belum merata, kondisi ekonomi masyarakat, serta keterbatasan distribusi bantuan pendidikan. Wilayah yang luas dan banyaknya daerah terpencil menyebabkan akses menuju lembaga pendidikan tinggi menjadi sulit, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Infrastruktur transportasi yang terbatas serta kondisi geografis yang sulit dijangkau menjadi hambatan utama dalam melanjutkan pendidikan (Anang Aria, 2025).

Di sisi lain, kualitas pendidikan yang belum merata juga menjadi tantangan serius. Banyak sekolah di daerah terpencil yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik serta keterbatasan fasilitas, termasuk akses terhadap teknologi dan internet. Hal ini berdampak pada rendahnya kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama, di mana banyak keluarga yang lebih memprioritaskan kebutuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan investasi pendidikan jangka panjang (M. Rifani Dewantara, 2025).

Permasalahan tersebut diperparah dengan belum meratanya distribusi bantuan pendidikan

dari pemerintah. Meskipun terdapat program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), akses terhadap bantuan tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan masih banyak pelajar yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya (Anang Aria, 2025).

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengimplementasikan program beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Namun demikian, meskipun program beasiswa telah berjalan sejak tahun 2014, tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Kabupaten Seruyan masih tergolong rendah, yaitu sekitar Jumlah tersebut 107,08 ribu jiwa (4,06%) penduduk yang berpendidikan S1 dan 6,26 ribu jiwa (0,24%) penduduk Kalteng yang berhasil meraih gelar pendidikan S2 (Viva Budy Kusnandar, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan beasiswa belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah kurangnya transparansi dalam proses seleksi, terbatasnya sosialisasi program kepada masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Selain itu, koordinasi antar aktor kebijakan juga masih belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait kapasitas kebijakan (*policy capacity*) dalam implementasi program beasiswa di Kabupaten Seruyan. Pendekatan ini penting untuk memahami sejauh mana kemampuan pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan secara efektif. Dengan menggunakan kerangka *policy capacity*, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan serta memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas kebijakan beasiswa sebagai instrumen peningkatan akses pendidikan tinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu dengan fokus

pada kapasitas kebijakan (*policy capacity*). Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi seperti peraturan kebijakan, laporan pemerintah, data statistik, serta literatur ilmiah yang relevan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Seruyan dengan objek kajian kebijakan pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, yaitu penelaahan berbagai dokumen untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan kerangka *policy capacity* yang mencakup *administrative capacity*, *contingent political management*, dan *expectations satisfaction* (Brenton et al., 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil Implementasi kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan. Hal ini tercermin dalam keberadaan regulasi resmi yang mengatur pemberian beasiswa, sebagaimana tertuang dalam yang menegaskan bahwa program beasiswa ditujukan bagi peserta didik yang tidak mampu dan/atau berprestasi. Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mencegah terjadinya putus sekolah. Selain itu, pembiayaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan adanya dukungan fiskal yang cukup kuat dari pemerintah daerah (Perbup Seruyan, 2025).

Sejalan dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah Kabupaten Seruyan juga merealisasikan komitmennya melalui alokasi anggaran yang cukup signifikan. Salah satunya adalah pengucuran dana sebesar Rp1 miliar untuk program beasiswa bagi putra-putri daerah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi juga berupaya mengimplementasikan program secara konkret sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di daerah (Diskominfo Kabupaten Seruyan, 2025).

Namun demikian, meskipun dukungan regulasi dan anggaran telah tersedia,

implementasi kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan akses terhadap program beasiswa itu sendiri. Sejumlah mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi maupun mengakses proses pengajuan beasiswa (Sastro Radar Sampit, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa program yang seharusnya bersifat inklusif belum sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran secara optimal.

Keterbatasan akses tersebut tidak terlepas dari kurang optimalnya proses sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya permintaan dari pemerintah daerah agar Dinas Pendidikan meningkatkan sosialisasi program beasiswa, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi maupun persyaratan program tersebut (Berita Seruyan, 2020). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek komunikasi kebijakan masih menjadi salah satu titik lemah dalam implementasi program beasiswa di Kabupaten Seruyan.

Di sisi lain, meskipun terdapat berbagai kendala dalam implementasi, program beasiswa tetap mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif daerah. DPRD Kabupaten Seruyan mendorong agar program beasiswa terus dilanjutkan karena dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat (Kusnadi, 2022). Dukungan politik ini menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program serta memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat daerah.

Lebih lanjut, dalam pembangunan daerah, program beasiswa juga diposisikan sebagai bagian dari strategi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan, termasuk melalui penguatan program bantuan pendidikan seperti beasiswa (Berita Satu Seruyan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan beasiswa tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam agenda pembangunan daerah secara lebih luas.

Meskipun demikian, berbagai tantangan struktural masih menjadi hambatan dalam

implementasi kebijakan. Berdasarkan laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, kondisi geografis wilayah yang luas serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program pendidikan di lapangan. Kondisi ini secara tidak langsung juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program beasiswa, terutama dalam hal distribusi informasi, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan telah didukung oleh aspek regulasi dan anggaran yang memadai. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama pada aspek akses informasi, sosialisasi, serta faktor geografis dan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan dalam implementasi program beasiswa masih perlu diperkuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Analisis Policy Capacity

Kapasitas kebijakan (*policy capacity*) merupakan kemampuan pemerintah dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan publik secara efektif, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya, proses, dan hasil kebijakan secara optimal (Brenton et al., 2023). Dalam kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan, kapasitas ini terlihat dari adanya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan program bantuan pendidikan yang didukung oleh regulasi dan anggaran daerah sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam perspektif *policy capacity*, Brenton menjelaskan bahwa dimensi pertama adalah *administrative capacity*, yaitu kemampuan pemerintah dalam menyediakan dan mengelola sumber daya kebijakan. Dalam praktiknya, Kabupaten Seruyan telah memiliki dasar administratif yang cukup kuat melalui adanya pedoman resmi pemberian beasiswa sebagaimana diatur dalam, yang menunjukkan adanya dukungan regulasi dan kelembagaan. Namun demikian, kapasitas administratif tidak hanya diukur dari ketersediaan sumber daya, tetapi juga dari efektivitas pengelolannya. Dalam implementasinya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses dan

hambatan geografis yang memengaruhi pelaksanaan program di lapangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun program Beasiswa Pancakarsa di Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik dan rutin, masih terdapat hambatan administratif seperti sistem berbasis web yang sering mengalami gangguan (*down*) serta kurangnya komunikasi antara pengelola dan pendaftar. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam kapasitas administratif tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan sistem pendukung kebijakan.

Selanjutnya, dimensi kedua yaitu *contingent political management* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola proses kebijakan, termasuk koordinasi antar aktor dan dukungan politik. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, kebijakan beasiswa mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah maupun DPRD, yang tercermin dari keberlanjutan program serta alokasi anggaran. Namun demikian, kapasitas politik tidak hanya dilihat dari adanya dukungan, tetapi juga dari efektivitas proses kebijakan. Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam sosialisasi program yang menyebabkan banyak masyarakat belum mengetahui informasi beasiswa. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian Yullya Putri Utami di Kabupaten Lamandau yang menemukan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam implementasi program beasiswa daerah, meskipun dari sisi sumber daya telah tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam komunikasi dan koordinasi menjadi masalah umum dalam dimensi manajemen politik kebijakan (Utami, 2021).

Selain itu, dimensi *contingent political management* juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola keterbatasan sumber daya dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, penelitian Dini Dwi Anggraini et al. di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan beasiswa masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya finansial, waktu, serta kondisi ekonomi daerah yang memengaruhi pencapaian target kebijakan. Temuan ini memperkuat bahwa kapasitas politik dan manajerial tidak hanya berkaitan dengan dukungan aktor, tetapi juga

dengan kemampuan dalam mengelola keterbatasan yang ada dalam proses kebijakan (Anggraini et al., 2024).

Dimensi ketiga yaitu *expectations satisfaction* berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai hasil dari kebijakan yang diimplementasikan. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, program beasiswa pada dasarnya telah memberikan manfaat dalam membantu akses pendidikan bagi masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam hal akses informasi dan transparansi, yang menyebabkan belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat program secara optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nanita Tabuni et al. yang menunjukkan bahwa program beasiswa di Kabupaten Pegunungan Bintang telah mampu meningkatkan capaian akademik dan non-akademik mahasiswa, namun masih terdapat variasi dalam pencapaian tujuan program, seperti kemampuan adaptasi dan pengembangan diri yang belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari kualitas outcome yang dirasakan oleh penerima manfaat (Tabuni et al., 2024).

Dengan demikian, ketiga dimensi *policy capacity* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan memiliki pola yang serupa dengan berbagai daerah lain, yaitu telah memiliki dasar kebijakan yang kuat, namun masih menghadapi kendala dalam implementasi. Kelemahan pada aspek administratif, komunikasi kebijakan, serta pemenuhan ekspektasi masyarakat menjadi tantangan utama yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kebijakan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan program, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan koordinasi antar aktor agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui dukungan regulasi dan alokasi anggaran. Program

beasiswa telah berjalan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu instrumen strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan masih belum optimal, yang ditunjukkan oleh adanya berbagai kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta hambatan geografis yang memengaruhi distribusi program. Selain itu, aspek transparansi serta mekanisme monitoring dan evaluasi juga belum berjalan secara maksimal. Jika dianalisis menggunakan kerangka *policy capacity*, terlihat bahwa kapasitas administratif dan dukungan politik telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas implementasi dan pemenuhan ekspektasi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kebijakan cenderung berjalan secara formal, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kapasitas kebijakan secara komprehensif. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi dan akses informasi melalui berbagai media agar program beasiswa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan penyaluran beasiswa, serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, khususnya pada instansi pelaksana, menjadi penting untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Pemanfaatan sistem digital juga perlu dikembangkan untuk mempermudah akses dan pengelolaan program, terutama dalam mengatasi kendala geografis. Dengan demikian, diharapkan kebijakan beasiswa di Kabupaten Seruyan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Anang Aria. (2025). *Tantangan Layanan Publik dalam Bidang Pendidikan di Kalimantan Tengah Tahun 2025 - Ombudsman RI*. <https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Pwki>

[nternal--Tantangan-Layanan-Publik-Dalam-Bidang-Pendidikan-Di-Kalimantan-Tengah-Tahun-2025.](#)

- Anggraini, D. D., Hanani, R., & ... (2024). Implementasi Kebijakan Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/43737%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/43737/30919>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (tahun), 2025.*
<https://Kalteng.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/NDUjMg==/-Metode-Baru-Rata-Rata-Lama-Sekolah-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Kalimantan-Tengah.Html>.
- Berita Satu Seruyan. (2024). *Strategi Mengatasi Persoalan Daerah untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.*
<https://Beritaseruyan.Com/2024/11/07/Strategi-Mengatasi-Persoalan-Daerah-Untuk-Meningkatkan-Pelayanan-Dan-Kesejahteraan-Masyarakat-Di-Kabupaten-Seruyan-Kalimantan-Tengah/>.
- Brenton, S., Baekkeskov, E., Hannah, A., Brenton, S., Baekkeskov, E., Policy, A. H., Brenton, S., Baekkeskov, E., & Hannah, A. (2023). *Policy capacity: evolving theory and missing links*.
<https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2043266>
- Diskominfo Kabupaten Seruyan. (2025). *Pemerintah Kabupaten Seruyan Kucurkan Beasiswa Rp1 Miliar bagi Putra-Putri Daerah.*
<https://Mmc.Kalteng.Go.Id/Berita/Read/49197/Pemerintah-Kabupaten-Seruyan-Kucurkan-Beasiswa-Rp1-Miliar-Bagi-Putra-Putri-Daerah>.
- Kemendikdasmen. (2025). *Definisi Wajib Belajar 13 Tahun.*
<https://Pmp.Kemendikdasmen.Go.Id/Implementasi/Hukum>.
- Kusnadi. (2022). *Bupati Seruyan akan Fokuskan Program Beasiswa.*
<https://Infopublik.Id/Kategori/Nusantara/621665/Index.Html>.
- M. Rifani Dewantara. (2025). *Sekolah di Tanjung Rangas Seruyan Hilir Kekurangan Guru dan Sarana Prasarana - Radar Sampit.*
<https://Radarsampit.Jawapos.Com/Kalten/2345705168/Sekolah-Di-Tanjung-Rangas-Seruyan-Hilir-Kekurangan-Guru-Dan-Sarana-Prasarana>.
- Peraturan Bupati. (2018). *Bupati seruyan provinsi kalimantan tengah.* 1–8.
- Perbup Seruyan. (2025). *Perbup Seruyan No. 6 Tahun 2025.*
- Republik Indonesia. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.*
- Sastro Radar Sampit. (2019). *Mahasiswa Seruyan Sulit Akses Beasiswa.*
<https://Www.Prokal.Co/Kalimantan-Tengah/Amp/1773990929/Mahasiswa-Seruyan-Sulit-Akses-Beasiswa>.
- Tabuni, N., Kristen, U., Wacana, S., Satyawati, S. T., Kristen, U., Wacana, S., Ismanto, B., Kristen, U., & Wacana, S. (2024). *Evaluasi Program Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pegunungan Bintang Menggunakan Model Goal Oriented Evaluation.*
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12.
<https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>
- Viva Budy Kusnandar. (2021). *Sebanyak 310 Penduduk Kalimantan Tengah yang Berpendidikan S3.*
<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/Ceb6600e5ab6e07/Sebanyak-310-Penduduk-Kalimantan-Tengah-Yang-Berpendidikan-S3>.
- Viva Budy Kusnandar. (2024). *Tak Sampai 7% Penduduk Indonesia yang Lulus Perguruan Tinggi pada 2023.*
<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Pendidikan/Statistik/7babc92c2c35133/Tak-Sampai-7-Penduduk-Indonesia-Yang-Lulus-Perguruan-Tinggi-Pada-2023>.